

Merawat Keragaman dan Kebangkitan Nasional

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

“Kegelapan tidak dapat melenyapkan kegelapan. Hanya cahaya yang dapat melakukannya. Kebencian tidak bisa melenyapkan kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya”.

Itulah kata-kata Marthin Luther King Jr (1929-1968), ketika ia tanpa rasa lelah terus mengelorakan semangat anti diskriminasi dengan cara-cara damai. Mewujudkan sebuah mimpi besar Amerika tanpa menyanjung rasialisme. Ia adalah seorang pendeta di Gereja Baptis Montgomery, Alabama yang berjuang melawan diskriminasi rasial. Pada tahun 1963, King memimpin demonstrasi pemboikotan bus di Birmingham. Pemboikotan itu dilakukannya tanpa menggunakan kekerasan. Namun sayang, pada tanggal 4 April 1968 Luther King tewas ditembak dalam salah satu aksi damainya di Memphis pada usianya yang ke-39.

Bila di negara sekelas Amerika yang sudah merdeka ratusan tahun saja kesejajaran dan persamaan hak begitu beratnya diperjuangkan, terlebih di Indonesia yang baru beberapa dekade merdeka. Tulisan inipun hanya terfokus pada merawat keragaman berbangsa dan kebebasan beragama.

Merawat Keragaman

Kosakata keragaman dan keseragaman, sepintas mirip tetapi ketika dibawa ke ranah implementasi, bisa jadi konsekwensinya saling bertolak punggung. Bahkan bila kurang sensitif mengelolanya, bermuara pada situasi konflik tanpa ujung. Itu sebabnya Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang multi kultur, multi ras, multi etnik, multi religiusitas harus sangat cermat dan super hati-hati agar gesekan pada level akar rumput tidak justru memicu letupan sosial tanpa kontrol.

Catatan kelam, kerusuhan rasial pada era Orde Baru bahkan awal reformasi tahun 1998, adalah lembar gelap yang mesti menjadi pelajaran penting bangsa ini untuk *move on*, bukan justru berhalusinasi. Keragaman bisa berubah menjadi energi destruktif yang amat liar, ketika apresiasi satu kelompok kepada ‘liyan’ hanya artifisial, kosmetika, penuh hipokripsi, jauh dari nilai-nilai ketulusan.

Menumbuhkan nilai-nilai ketulusan berbangsa di ruang publik yang serba pengap dengan segala intrik kegaduhan di sana-sini yang tidak produktif memang pekerjaan yang tidak mudah. Tidak saja diperlukan soliditas dan solidaritas elemen bangsa tapi juga kekuatan dan stamina yang terjaga. Jangan sampai kita bersatu

hanya ketika ada musuh di saat revolusi seperti Belanda, Nippon dan NICA yang sudah bagian dari masa lalu, namun lengah mengidentifikasi bahwa '*real enemy*' ada dekat dan bersama-sama dengan kita.

Kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, ketimpangan distribusi kemakmuran, korupsi dan intoleransi adalah beberapa problem krusial yang saat ini menyergap sebagian besar anak bangsa penghuni negeri ini. Tanpa menafikan persoalan-persoalan yang lebih awal disampaikan, problem intoleransi adalah masalah yang sangat sensitive untuk didiskusikan secara fair dan transparan.

Bahkan ketika pemerintah telah mencabut SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01/BER/mdnmag/1969 mengenai "Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya" yang ditanda tangani dan ditetapkan 13 September 1969 oleh Menteri Dalam Negeri dijabat Amir Machmud dan Menteri Agama dijabat K.H. Muhammad Dahlan, tetap menimbulkan kecurigaan. Apalagi gantinya adalah PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/8 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama" dan "Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah", sangat terasa muatan politisnya lebih kental daripada ketulusan untuk menciptakan ruang terbuka dalam spirit toleransi yang saling menghargai, sebagai sesama pemilik sah negeri ini.

Terbaca ada agenda setting yang sengaja didesain menguntungkan salah satu kelompok dan merugikan yang lain. Seperti dalam hal adanya persyaratan dukungan dari masyarakat berupa 60 KTP berpeluang melahirkan diskriminasi. Menurut temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI), masyarakat Indonesia umumnya tidak toleran terkait pendirian rumah ibadah. Sebanyak 64.9% umat Islam keberatan di daerahnya dibangun rumah ibadah agama lain. Di wilayah tertentu yang masyarakatnya toleran, persyaratan ini tidak jadi masalah, akan tetapi di daerah yang kurang atau tidak toleran, pendirian rumah ibadah bisa terhambat (Ali-Fauzi dkk, 2011).

Pada problem toleransi-intoleransi inilah, bangsa yang sudah menyatakan 'satu bangsa' pada tahun 1928 yang berakar dari bangkitnya kesadaran nasional tahun 1908, tetap belum tuntas menemukan jawabannya. Elite-elite bangsa ini kerap lupa betapa rumah besar yang bernama Indonesia ini adalah rumah bersama yang harus dikelola dalam spirit kebersamaan menjauhkan pola relasi ordinat-subordinat. Tidak ada stratifikasi kelas sosial. Semua agama, semua budaya, semua etnik harus merasa nyaman hidup didalamnya.

Menumbuhkan Kesadaran Baru

Maka yang diperlukan bangsa ini adalah hidup dalam kesetaraan, tidak saling intimidatif serta mampu menumbuhkan saling kepercayaan satu sama lain. Di atas

semua itu negara harus netral menjalankan tugas-tugas perlindungan tanpa memihak satu kepada yang lainnya. Dalam konteks kebebasan beragama, negara harus bertindak obyektif memperlakukan semua sama berdasarkan regulasi dan standar baku.

Bedasarkan standar yang diterapkan Center for Religious Freedom (CRF) dalam Religious Freedom in the World (2008). Standar asli CRF, kebebasan beragama menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) ada/tidaknya peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama; (2) apakah pemerintah memfavoritkan agama tertentu; dan (3) apakah terdapat dinamika atau konvensi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi di Indonesia saat ini? Apakah dengan terbitnya beberapa regulasi negara tersebut, kebebasan beragama menjadi lebih longgar atau justru sebaliknya?

Jika acuan konvensi internasional itu dipadu dengan bunyi Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945"): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Maka, tugas negara tidak boleh intervensi tetapi cukup melakukan fasilitasi agar semua pihak mematuhi aturan main yang dibuat tersebut. Tidak peduli apakah sebagian dari mereka itu mayoritas atau minoritas. Prinsip yang berlaku jangan sampai kelompok besar berganti wajah menjadi kekuatan dominan yang melumpuhkan. Dan sekali kelak minoritas menjadi tiran karena balas dendam.

Kerukunan dan ketidakharmonisan relasi sosial ibarat bentangan benang yang bergelombang. Ada saat naik, ada saat turun. Tetapi yang terpenting jangan sampai bentangan itu putus, yang kemudian sulit dirajut ulang. Sama dengan mimpi Marthin Luther King Jr tentang Amerika tanpa diskriminasi, tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia juga memimpikan Indonesia kelak adalah Indonesia dengan peradaban modern yang mengedepankan kebersamaan yang harmonis. Tidak terkungkung oleh misi kedaerahan Budi Utomo yang salah satu programnya berbunyi "*de harmonische ontwikkeling van land en volk van Jawa en Madura*" (kemajuan yang harmonis bagi nusa Jawa dan Madura). Harus tumbuh kesadaran baru, bahwa momentum kebangkitan nasional adalah turut merasakan Indonesia yang damai untuk dihuni aneka ragam corak pewarisnya.

***Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya**